JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(2), Juli 2022, 1133-1141
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i2.2328

Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Wisata Taman Ghanjaran di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Novia Cahyaningrum, Tukiman
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Correspondence email: novia.chyngrm@gmail.com, tukiman_upnjatim@yahoo.com

Abstrak. Pembangunan daerah akan terus dilaksanakan dan menjadi salah satu arah awal pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Dikarenakan pembangunan daerah di Indonesia masih belum merata dan terbilang belum maksimal, hal ini terlihat dari jumlah kemiskinan di Indonesia yang terus meningkat. Khususnya di daerah-daerah tertinggal seperti kawasan yang berada di desa. Tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisa mengenai Strategi BUMDes Dalam Mengembangkan Wisata Taman Ghanjaran Di Desa Ketapanrame Trawas Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melaksanakan wawancara kepada informan, observasi, serta dokumentasi. Selanjutnya, model analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif terdiri atas pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa BUMDes Ketapanrame sudah melakukan strategi yang berfokus pada pengembangan destinasi pariwisata secara optimal. Dan strategi yang berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia , Kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul serta mepunyai daya saing masih belum dilaksanakan secara optimal oleh BUMDes Ketapanrame di Wisata Taman Ghanjaran.

Kata kunci: BUMDes; Pengembangan Wisata; Strategi; Wisata Taman Ghanjaran

Abstract. *Regional development will continue to be implemented and become one of the government's initial directions for the welfare of the community. Due to the fact that regional development in Indonesia is still uneven and not maximized, this can be seen from the increasing number of poverty in Indonesia. Especially in underdeveloped areas such as areas in villages. The purpose of this research is to describe and analyze the BUMDes Strategy in Developing Ghanjaran Park Tourism in Ketapanrame Village, Trawas Mojokerto. The type of research used is descriptive qualitative. In this study using data collection techniques used by conducting interviews with informants, observations, and documentation. Furthermore, the data analysis model in this study uses an interactive data analysis model consisting of data collection, data presentation, data condensation, and drawing conclusions. The results of this study explain that the BUMDes Ketapanrame has carried out a strategy that focuses on optimally developing tourism destinations. And strategies that focus on managing human resources, tourism institutions and the creative economy in producing superior and competitive human resources have not been implemented optimally by BUMDes Ketapanrame at Taman Ghanjaran Tourism.*

Keywords**:** *BUMDes; Ghanjaran Park Tour; Strategy; Tourism Development*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah akan terus dilaksanakan dan menjadi salah satu arah awal pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Dikarenakan pembangunan daerah di Indonesia masih belum merata dan terbilang belum maksimal, hal ini terlihat dari jumlah kemiskinan di Indonesia yang terus meningkat. Khususnya di daerah-daerah tertinggal seperti kawasan yang berada di pedesaan. Akhirnya, dengan adanya hal itu pemerintah selalu mengupayakan berbagai macam bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan daerah sebagai upaya pemerataan kesejahteraan pedesaan, pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan wilayah. Otonomi desa merupakan bagian dari otonomi daerah yang diberikan berdasarkan atas undang-undang (Ardiana & Tjukup, 2018). Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan dampak yang besar pada kedudukan dan hubungan desa serta masyarakat untuk membangun desa secara kolektif bersama daerah serta pemerintah yang mencakup kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa (Aziz, 2016). Setelah terlaksananya era desentralisasi yang tersturktur secara jelas hingga mencakup wilayah pemerintah daerah terkecil ialah wilayah pedesaan. Pemerintah desa memiliki kewenangan agar mengatur secara mandiri terkait pembangunan desa melalui pendirian badan usaha milik desa (BUMDes). BUMDes diharapkan mampu sebagai roda penggerak sektor perekonomian pada wilayah desa yang berguna menjadi lembaga sosial dan komersial (Ihsan, 2018). Kegiatan dan usaha BUMDes di Indonesia sangat bergantung pada potensi karakteristik daerah dan sumber daya di setiap desa.

Aturan keberlanjutan mengenai BUMDes termuat pada Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto yang memuat mengenai BUMDes adalah Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah Kabupaten Mojokerto berusaha semaksimal mungkin dalam memotivasi desa untuk membangun BUMDes, baik pada wujud lahirnya peraturan perundang-undangan yang diusahakan sendiri dari pemerintah desa. Salah satu BUMDes yang berada di Kabupaten Mojokerto yang didirikan masyarakat desa di tahun 2001 ialah BUMDes Ketapanrame. Akan tetapi, dengan lamanya BUMDes berdiri tidak memungkinkan untuk mewujudkan desa yang mandiri dan memajukan perekonomian desa. Sehingga, pada akhir tahun 2018 BUMDes Ketapanrame mengembangkan unit usaha baru yaitu pada bidang pariwisata. BUMDes ketapanrame memiliki lima jenis unit usaha yang dikelola. Unit usaha tersebut terdiri dari unit pengelolaan air minum, unit pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan, unit yang mengelola kios dan kandang ternak, unit simpan pinjam dan kemitraan, dan unit wisata desa.

Wisata Taman Ghanjaran merupakan wisata desa yang berdiri diatas Tanah Kas Desa (TKD) yang luasnya mencapai sekitar 2,8 hektar. Sebelum adanya taman wisata seperti ini, tempat tersebut merupakan wilayah pertanian yang pengelolaan nya dilakukan oleh warga lokal, namum muncul permasalahan dari tahun ke tahun yaitu berawal dari hasil panen yang terus mengalami penurunan, hasil gaji dari pengelolaan persawahan di tanah ghanjaran terbilang minim yang berakibat sangat tidak efisiensi dalam menambah pemasukan PADesa Ketapanrame yang akhirnya membuat pengelolaan lahan ini terhenti. Hal tersebut mengakibatkan munculnya beberapa ide yang diusulkan pada musyawarah desa untuk mengubah tempat ini sebagai desa wisata. Dengan adanya ide yang muncul pada tahun 2016, yaitu mengubah fungsi tanah ganjaran yang sebelum nya tanah tersebut digunakan sebagai lahan pertanian dialihkan fungsi menjadi lahan yang akan dibangun sebagai tempat wisata. Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyetujui dengan adanya pengalihan fungsi tanah tersebut dengan mengucurkan bantuan keuangan (BK) desa sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk pembangunan Wisata Taman Ghanjaran. Terciptanya Wisata Taman Ghanjaran ini tidak terlepas dari peran BUMDes Ketapanrame. Dengan adanya Wisata Taman Ghanjaran yang menjadi bagian unit yang dioperasikan oleh BUMDes ini, mampu meningkatkan PADesa Ketapanrame. Selain itu, digunakan untuk menciptakan lapangan kerja dan menambah pemasukan pada perekonomian warga Desa Ketapanrame. Pada waktu ini total 300 warga lokal sebagai pelaku usaha yang terlibat di dalam Wisata Taman Ghanjaran. Bahkan penghasilan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Ketapanrame yang paling besar diperoleh dari aktivitas unit pariwisata, padahal unit usaha tersebut baru di kembangkan jika dibandingkan oleh tiga unit usaha lain nya yang sebelumnya sudah dikelola oleh BUMDes Ketapanrame.

BUMDesa Ketapanrame merupakan BUMDes yang mendapatkan penghargaan sebagai juara satu BUMDes terbaik se-Jawa Timur pada tahun 2020. Diraihnya prestasi tersebut merupakan wujud dari desa mandiri dalam mengelola potensi kewilayahannya. Salah satu yang dikelola BUMDes Ketapanrame yakni Wisata Taman Ghanjaran. Wisata Taman Ghanjaran sebagai pengembangan wisata lokal dengan membuka peluang pada kegiatan ekonomi kreatif dan pelaku usaha lokal sendiri. Kemudian, dijadikan untuk percontohan pengembangan desa mandiri dengan menggunakan TKD yang dimanfaatkan sebagai tempat untuk membentuk wisata yang berlokasi di Desa Ketapanrame. Karena dengan adanya Wisata Taman Ghanjaran di Desa Ketapanrame, Desa Ketapanrame bisa mandiri secara perekonomian yang memanfaatkan dari potensi desa sendiri. Pencapaian Wisata Taman Ghanjaran di Desa Ketapanrame yang luar biasa, hal tersebut juga berpengaruh baik pada Desa Ketapanrame sehingga pada tahun 2021 Desa Ketapanrame meraih Juara II se-Indonesia sebagai Desa Brilian. Hal tersebut tidak terlepas dari kerjasama pihak BUMDes serta masyarakat desa tersebut dalam perkembangan Wisata Taman Ghanjaran. Sehingga, BUMDes Ketapanrame selaku yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Wisata Taman Ghanjaran berusaha melakukan strategi dan inovasi-inovasi yang baru dalam mengembangkan Wisata Taman Ghanjaran di Desa Ketapanrame. Kemampuan BUMDes Ketapanrame dalam mengelola Wisata Taman Ghanjaran di Desa Ketapanrame berguna mengembangan sektor ekonomi di desa, serta masyarakat nya yang bertujuan agar masyarakat dapat menikmati manfaat yang berasal pada pengelolaan nya yang sama dengan visi BUMDes Ketapanrame. Setelah melihat perkembangan yang cukup pesat dari adanya Wisata Taman Ghanjaran di Desa Ketapanrame yang sebelumnya taman tersebut hanya berupa lahan pertanian yang hanya di sewakan dan beralih fungsi menjadi wisata desa hal tersebut tidak terlepas dari pihak BUMDes yang turut andil dalam mengembangkan Wisata Taman Ghanjaran di Desa Ketapanrame dengan strategi dan inovasi-inovasi yang akan dilaksanakan untuk mengembangkan taman tersebut.

Kajian Pustaka

Desa

Secara sosiologis, pengertian desa dijabarkan sebagai wujud kesatuan masyarakat atau kelompok penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah yang mengenal satu sama lain (Ismail, Muhammad., Widagdo, Ari Kuncara., Widodo, 2016). Menurut Soleh (2017) Desa merupakan wujud geografis yang ditimbulkan dari unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan yang berpengaruh timbal

balik dengan daerah lain. Sedangkan menurut P.J.Bournen yang dikutip dalam jurnal Nayoan & Undap, 2017 menjelaskan bahwa desa merupakan salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama dari beberapa ribu orang, hampir semuanya mengenal satu sama lain nya. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang terhubung, ketaatan, serta kaedah-kaedah sosial.

Otonomi Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah melahirkan otonomi bagi desa-desa untuk mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat desa. Desa telah diberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut "otonomi desa". Otonomi yang dimiliki desa tentunya berbeda dengan otonomi yang dimilki oleh daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Otonomi desa merupakan bagian dari otonomi daerah yang berdasarkan atas pemberiaan yang sesuai dengan undang-undang (Ardiana & Tjukup, 2018). Otonomi didasarakan pada hak asal usul desa yang dikutip dalam jurnal (Aziz, 2016). Sehingga otonomi desa bukan pemberian yang berasal dari negara. Namun, otonomi desa asal usul nya berawal dari desa sendiri.

BUMDes

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes merupakan badan usaha yang semuanya atau sebagian besar yang mempunyai modalnya ialah desa melalui penyertaan secara langsung yang berwal dari kekayaan desa yang dipisahkan agar dapat mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan pengertian lain menjelaskan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa yang bertujuan untuk memperkuat sektor ekonomi di desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Rohim, 2018).

Desa Wisata

Desa wisata merupakan kawasan yang berkaitan dengan wilayah atau berbagai kearifan lokal, adat-istiadat, budaya, potensi, yang dikelola untuk daya tarik wisata yang sesuai dengan kemampuannya, hal itu ditunjukan pada kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat (Hermawan, 2017). Sedangkan pengertian desa wisata *(village tourism)* menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dikutip dalam jurnal Utomo & Satriawan, 2018 ialah suatu kawasan pedesaan yang memiliki kekayaan desa yang unik dan daya tarik wisata yang khas, baik seperti keindahan lingkungan alam pedesaan atau kehidupan sosial budaya yang melibatkan masyarakat. Sedangkan menurut Sidiq & Resnawaty (2017) mendefinisikan desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat saling berkaitan dengan norma dan tradisi yang berjalan.

Strategi

Menurut Primadany (2013) strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan: Kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang akan dicapai, dan bagaimana menemukan upaya atau metode dalam menggunakan sarana prasarana. Strategi selalu berkaitan dengan 3 hal yaitu tujuan, sarana, dan cara. Sedangkan menurut Hayyuna (2014) mendefinisikan strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi maupun perusahaan yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, dan mengutamakan alokasi sumber daya. Pengembangan merupakan setiap usaha yang dapat memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan. Dengan kata lain pengembangan menurut Soeda (2017) adalah setiap kegiatan yang bertujuan agar dapat memperbaiki tingkah laku meliputi pengetahuan, kecakapan, sikap. Pengembangan destinasi pariwisata adalah suatu bagian dari sebuah rencana yang memiliki tujuan agar dapat membuat maju, memperbaiki serta meningkatkan kondisi daerah setempat yang sesuai sehingga akan menambah nilai dan berguna untuk masyarakat lokal yang berada disekitar kawasan wisata, wisatawan dan pemerintah daerah (Badarab et al., 2017).

Strategi Pengembangan Pariwisata

Langkah dalam strategi pengembangan kepariwisataan dikutip dalam Rencana Strategis Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2020-2024. Didalam Rencana Strategis Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 terdapat lima arah strategis di dalam pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi Kreatif (EKRAF), lima arah strategis tersebut yaitu :

1. Destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif (EKRAF). Destinasi pariwisata dan produk EKRAF pada bagian ini memfokuskan untuk pengembangan produk EKRAF yang berhubungan dengan kawasan EKRAF dan klaster penguatan EKRAF. Arah strategi yang digunakan yaitu: a) Mengembangkan produk EKRAF berbasis klaster dan kawasan EKRAF. b) Mengembangkan destinasi pariwisata berkualitas berdasarkan prioritas. c) Menerapkan destinasi

pariwisata berkelanjutan. d) Diversifikasi produk pariwisata

2. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif (EKRAF) berbasis kemitraan strategis (strategic partnership). Pemasaran pariwisata dan EKRAF dilaksanakan yang bertujuan untuk menciptakan kebutuhan pembeli produk pariwisata dan EKRAF. Arah strategi yang digunakan dalam tahap ini yaitu: a) *Niche market* wisatawan premium. b) Perluasan pangsa pasar produk EKRAF. c) Citra pariwisata serta produk EKRAF indonesia berdaya saing
3. Industri pariwisata dan ekonomi kreatif (EKRAF). Industri pariwisata dan industri EKRAF, pada bagian ini pertumbuhan dan pengelolaan industri pariwisata dan EKRAF terasuk pada salah satu faktor yang berpengaruh besar untuk mewujudkan tujuan akhir Kemenparekraf atau Baparekraf. Arah kebijakan yang digunakan dalam tahap ini yaitu: a) Pengembangan industri pariwisata dan industri EKRAF. b) Meningkatkan tatakelola pariwisata dan EKRAF nasional, serta investasi. c) Pendanaan serta akses pembiayaan industri pariwisata dan industri EKRAF.
4. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM), kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif (EKRAF). SDM dan kelembagaan pariwisata dan EKRAF. SDM merupakan strategi yang menentukan keberhasilan organisasi. Arah strategi yang digunakan dalam tahap ini yaitu: a) Optimalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan EKRAF. b) Sertifikasi sumber daya manusia (SDM) pariwisata dan EKRAF. c) Penguatan komunikasi, kelembagaann pariwisata dan EKRAF.
5. Kreativitas. Arah strategi yang digunakan yaitu: a) Perlindungan pada hasil kreativitas dan kekayaan intelektual. b) Mendukung kreasi untuk menciptakan nilai tambah EKRAF yang berhubungan dengan budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang Strategi BUMDes Dalam Mengembangkan Wisata Taman Ghanjaran di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Dengan menggunakan dua fokus langkah pokok dalam strategi pengembangan kepariwisataan di kutip dalam Rencana Strategis Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 yang *relevan* dan disesuaikan dengan keadaan Wisata Taman Ghanjaran. Strategi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif oleh KEMENPAREKRAF atau BAPAREKRAF pada tahun 2020-2024 yang digunakan yaitu strategi yang berfokus pada : 1) Pengembangan destinasi pariwisata dan produk EKRAF. 2) Pengelolaan sumber daya manusia (SDM), kelembagaan pariwisata dan EKRAF. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dengan informan, observasi di lapangan secara langsung, dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan model analisis data kualitatif *(interactive model) Miles and Huberman* (Sugiyono, 2019). Terdiri atas pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes Ketapanrame selaku penanggung jawab di dalam pengelolaan Wisata Taman Ghanjaran selalu berupaya dalam mengembangkan Wisata Taman Ghanjaran agar berdampak baik bagi lingkungan nya. Sehingga BUMDes Ketapanrame melakukan strategi dan inovasi dalam mengembangkan Wisata Taman Ghanjaran agar dapat bersaing dengan desa wisata lain nya. Setelah menjelaskan mengenai hasil penelitian yang di dapatkan dari hasil wawancara serta data pendukung. Selanjutnya, penulis akan menjabarkan mengenai analisa data pada pembahasan hasil penelitian yang sesuai pada rencana penelitian di dalam proposal penelitian mengenai Strategi BUMDes Dalam Mengembangkan Wisata Taman Ghanjaran Di Desa Ketapanrame Trawas Mojokerto. Berikut merupakan uraian pembahasan mengenai hasil penelitian yang kemudian akan dianalisa dengan menggunakan dua fokus langah pokok dalam strategi pengembangan kepariwisataan di kutip dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 yang *relevan* dan disesuaikan dengan keadaan Wisata Taman Ghanjaran yang akan dijelaskan di bawah ini:

Strategi pengembangan wisata yang berfokus pada destinasi pariwisata dan produk EKRAF di Wisata Taman Ghanjaran.

1. Pengembangan produk EKRAF berbasis klaster dan kawasan EKRAF.

   Strategi untuk mengembangkan produk EKRAF berbasis klaster dan kawasan EKRAF menurut Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 adalah strategi yang berupaya untuk meningkatkan kualitas produk EKRAF melalui pengembangan produk EKRAF berbasis kekayaan intelektual. Mengembangkan produk dilaksanakan dengan memanfatkan produk yang mengutamakan kekayaan intelektual pada kawasan EKRAF maupun klaster penguatan pada EKRAF yang akan dibangun. Salah satu prinsip menurut Atmoko (2014) adalah menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan. BUMDes Ketapanrame mengembangkan produk EKRAF dengan cara memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Ketapanrame yang kemudian di olah oleh masyarakat Desa Ketapanrame

yang akhirnya di jual di Wisata Taman Ghanjaran. Produk EKRAF yang memanfaatkan produk asli desa nya sendiri meliputi keripik mbote, keripik tela, keripik jamur, keripik pisang. Serta memanfaatkan kopi yang diolah menjadi bubuk kopi dan minuman. Upaya yang dilakukan oleh BUMDes Ketapanrame dalam mengembangkan kawasan EKRAF di Wisata Taman Ghanjaran dengan cara BUMDes Ketapanrame memfasilitasi tempat berupa *stand* atau kios yang digunakan berdagang makanan di Wisata Taman Ghanjaran. Dengan adanya fasilitas yang dilengkapi oleh BUMDes Ketapanrame. *stand* atau kios tersebut dinamakan pujasera yang dijadikan sebagai wisata kuliner di Wisata taman Ghanjaran. Dengan adanya pujasera kawasan EKRAF di Wisata Taman Ghanjaran dapat berjalan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasan nya strategi pengembangan produk EKRAF berbasis klaster dan kawasan EKRAF sudah dilaksanakan oleh BUMDes Ketapanrame dalam mengembangkan Wisata Taman Ghanjaran. Yang mempunyai dampak positif bagi masyarakat Desa Ketapanrame. Dikarenakan pengembangan produk EKRAF dan kawasan EKRAF yang dilaksanakan oleh BUMDes Ketapanrame melibatkan pemanfaatan produk asli Desa Ketapanrame dan masyarakat Desa Ketapanrame.

2. Pengembangan destinasi pariwisata berkualitas berdasarkan prioritas.

   Pengembangan destinasi pariwisata berkualitas berdasarkan prioritas menurut Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 adalah strategi yang dilakukan untuk pengembangan destinasi pariwisata berkualitas berdasarkan prioritas yang menekankan pada pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata nasional yang bertujuan untuk menambah daya tarik pengunjung. Destinasi pariwisata berkualitas yang dimaksud yaitu destinasi pariwisata yang dapat memenuhi unsur 3A, yaitu Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas yang berkaitan dengan yang lainnya. Upaya yang dilaksanakan oleh BUMDes dalam mengembangkan destinasi pariwisata berkualitas berdasrakan prioritas dengan cara mengembangkan destinasi yang dilakukan secara bertahap untuk menarik wisatawan agar datang ke Wisata Taman Ghanjaran. Pengembangan pertama yang dilaksanakan oleh BUMDes Ketapanrame yaitu membuat taman dengan adanya gazebo yang dapat digunakan pengunjung untuk bersantai. Kemudian pengembangan yang kedua dengan melibatkan kerjasama dengan masyarakat desa sebagai pelaku usaha. Yaitu dengan adanya taman yang dilengkapi wahana mainan yang minimalis yang dapat digunakan oleh pengunjung. Pengembangan berikutnya yaitu BUMDes Ketapanrame menambah destinasi wisata yaitu arena *swimingpool*. Kemudian pengembangan selanjutnya agar daya tarik wisatawan semakin meningkat untuk berkunjung pada Wisata Taman Ghanjaran BUMDes Ketapanrame mengembangkan destinasi pariwsata dengan adanya wahana-wahana yang besar di Wisata Taman Ghanjaran. BUMDes Ketapanrame juga tidak hanya mengembangkan pada destinasi pariwisata nya saja, melainkan dengan melengkapi fasilitas umum yakni dengan adanya tema ibadah, toilet, dan area parkir yang cukup memadai agar pengunjung nyaman saat berada di Wisata Taman Ghanjaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BUMDes Ketapanrame sudah melaksankan strategi dalam pengembangan destinasi wisata yang berkualitas berdasarkan prioritas di Wisata Taman Ghanjaran melalui pengembangan destinasi wisata yang dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan masyarakat Desa Ketapanrame dan juga memperhatikan aspek lingkungan yang mencakup 3A yaitu Atrakasi, Amenitas, dan Aksesibiltas. Dengan tujuan agar Wisata Taman Ghanjaran menjadi wisata yang lebih maju lagi dan banyak menarik wisatawan datang untuk berkunjung.

3. Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan

   Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan menurut Rencana Strategis Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 merupakan strategi yang terkait mengenai pengembangan dan pengelolaan destinasi dilakukan secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan yang dilaksanakan berdasarkan permintaan pasar yang di utamakan. Pada saat inii dengan kondisi new normal setelah pandemi *COVID-19* memerlukan adanya kesiapan tempat pariwisata yang mengutamakan aspek kebersihan, keselamatan, dan keamanan, dan pelaksanaan protokol kesehatan. Upaya yang dilaksanakan oleh BUMDes Ketapanrame dalam menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan di Wisata Taman Ghanjaran dengan cara melaksanakan kesiapan destinasi dengan mengutamakan kebersihan, keselamatan, dan keamanan. Kemudian, menerapkan pelaksanaakn protokol kesehatan dalam upaya pengelolaan destinasi pariwisata di masa pandemi *COVID-19*. BUMDes Ketapanrame membuat peraturan wajib menerapkan protokol kesehatan dengan melaksanakan untuk wajib mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan berkerumun di Wisata taman Ghanjaran. Peraturan tersebut wajib di laksanakan oleh pengujung dan semua pelaku usaha yang terlibat di Wisata Taman Ghanjaran. BUMDes Ketapanrame juga memfasilitasi tempat untuk mencuci tangan dan *handsanitizer* serta semua area di Wisata Taman Ghanjaran sudah dilengkapi dengan *barcode* pendulilindungi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasan nya BUMDes Ketapanrame sudah melaksankan strategi dalam pengembangan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan pada

Wisata Taman Ghanjaran. Penerapan strategi dalam pengembangan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan pada Wisata Taman Ghanjaran bertujuan agar Wisata Taman Ghanjaran dapat beroperasi di dalam masa pandemi yang sulit ini. Dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Ketapanrame mata pencaharian nya sebagai pelaku usaha di dalam Wisata Taman Ghanjaran.

4. Diversifikasi produk pariwisata
   Diversifikasi produk pariwisata menurut Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 adalah strategi yang menitikberatkan dalam mengembangkan produk pariwisata yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dan juga unik, agar dapat menarik minat pengunjung. Kemudian, pengembangan produk wisata wajib mengutamakan pelestarian lingkungan, budaya, dan melibatkan masyarakat. Sukmaratri & Damayanti (2016) juga berpendapat bahwa diversifikasi produk pariwisata ialah usaha untuk menggali dan mengembangkan produk atau tempat yang baru. Atau kedua nya yang berguna mengejar pertumbuhan, meningkatkan penjualan, profitabilitas dan fleksibilitas. BUMDes Ketapanrame menciptakan unit usaha yang baru yaitu unit pariwisata yang ada di Desa Ketapanrame dengan memanfaatkan TKD sebagai tempat pembangunan nya. BUMDes Ketapanrame membuat Wisata Taman Ghanjaran dengan daya tarik utama nya yaitu melalui wisata buatan. Dengan adanya wisata buatan yang dikembangkan oleh BUMDes Ketapanrame tersebut mampu menarik wisatawan datang ke Wisata Taman Ghanjaran. Selain itu, BUMDes juga memprioritaskan kenyamanan dengan adanya Wisata Taman Ghanjaran yang dilengkapi fasilitas umum yang dapat digunakan oleh pengunjung. Selain itu aksesbilitas pada Wisata Taman Ghanjaran juga cukup mudah, dikarenakan letak Wisata Taman Ghanjaran cukup strategis berada di samping jalan raya sehingga memudahkan pengunjung untuk mengakses jalan menuju Wisata Taman Ghanjaran. Dengan adanya diversifikasi produk pariwisata pada Wisata Taman Ghanjaran bertujuan untuk menarik minat wisatawan datang ke Wisata Taman Ghanjaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BUMDes Ketapanrame sudah melaksanakan strategi mengenai diversifikasi produk pariwisata di Wisata Taman Ghanjaran dengan cara membuat wisata baru yang belum ada sebelum nya di Desa Ketapanrame. Dengan memanfaatkan TKD sebagai tempat pembangunan nya wisata tersebut kemudian dinamakan Wisata Taman Ghanjaran dengan wisata buatan sebagai daya tarik utama untuk menarik minat pengunjung datang ke Wisata Taman Ghanjaran.

Strategi dalam pengelolaan SDM, Kelembagaan pariwisata dan EKRAF pada Wisata Taman Ghanjaran.

1. Optimalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan EKRAF.
   Pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilaksanakan betujuan untuk menghasilkan SDM yang siap bekerja yang sama dengan keahlian nya. Optimalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan EKRAF menurut Rencana Strategis Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 merupakan strategi yang memfokuskan pada optimalisasi pendidikan, pelatihan vokasi pariwisata dan ERKRAF baik kelembagaan pendidikan dan pelatihan nya, serta kurikulum yang sama dengan kebutuhan kerja. Sehingga di harapkan dapat menghasilkan SDM pariwisata dan EKRAF yang unggul agar dapat bersaing dengan SDM yang lain nya. Sumber daya manusia (SDM) adalah bagian yang dasar untuk acuan pada pelaksanaan pembangunan bangsa. SDM yang unggul dapat bersaing pada segala aspek dapat mendukung untuk meningkatkan pembangunan terutama untuk sektor pariwisata. Hatta (2019) berpendapat bahwa salah satu usaha untuk mengelola sumber daya manusia (SDM) ialah melalui adanya pelatihan vokasi. BUMDes Ketapanrame melaksanakan pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan EKRAF nya dengan cara mengikuti seminar dan sosialisasi mengenai wisata dan EKRAF yang dilaksanakan oleh dinas atau bidang yang berkaitan dengan wisata dan EKRAF. Kemudian BUMDes Ketapanrame berupaya dalam pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan EKRAF nya dengan cara mendapatkan pelatihan mengenai pengelolaan wisata dari DISPARPORA Kabupaten Mojokerto, POLDA Jawa Timur, dan mendapatkan pelatihan EKRAF dari ASTRA, BUMDes IDEA, UBAYA, KEMENDIKBUD, dan DPMD Jawa Timur. Kemudian dengan mengikuti lomba mengenai desa wisata agar mendapatkan pembinaan dalam mengembangkan Wisata Taman Ghanjaran. Dan BUMDes Ketapanrame melaksanakans sharing bersama BUMDes-BUMDes lain yang lebih unggul dari BUMDes Ketapanrame dalam mengelola unit wisata nya. Upaya yang sudah dilaksanakan oleh BUMDes Ketapanrame dalam pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan EKRAF yang berada di Wisata Taman Ghanjaran bertujuan untuk menjadikan SDM pada Wisata Taman Ghanjaran menjadi SDM pariwisata dan EKRAF yang unggul serta berdaya saing. Dengan demikian diketahui bahwa BUMDes Ketapanrame sudah melaksanakan strategi mengenai pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan EKRAF pada Wisata Taman Ghanjaran.

2. Sertifikasi SDM pariwisata dan EKRAF
   Agar dapat menghasilkan SDM pariwisata dan EKRAF yang kompeten serta profesional, membutuhkan dengan adanya pelaksanan sertifikasi kompetensi SDM yang dilaksanakan secara akuntabel yang di sesuaikan dengan kebutuhan nya. Sertifikasi SDM pariwisata dan EKRAF menurut Rencana Strategis Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 adalah Strategi yang mengutamakan di program sertifikasi SDM pariwisata dan EKRAF yang bertujuan untuk menghasikan SDM yang kompeten serta profesional. Strategi ini dilaksanakan dengan cara kolaborasi bersama instansi terkait yang sesuai dengan tugas dan kewenangan nya. BUMDes Ketapanrame melaksanakan sertifikasi SDM pariwisata dan EKRAF pada Wisata Taman Ghanjaran melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas atau mitra yang berkaitan dengan pariwisata dan EKRAF yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pada SDM pariwisata dan EKRAF pada Wisata Taman Ghanjaran. Pelatihan nya meliputi pelatihan yang diadakan oleh DISPARPORA Kabupaten Mojokerto yaitu pelatihan mengenai pariwisata dan akomodasi. Kemudian pelatihan mengenai tim penyelamatan/*rescue* yang diadakan oleh POLDA Jawa Timur. Setelah itu ada pelatihan mengenai EKRAF yang diadakan oleh DPMD Jawa Timur melalui program SINANDO. Pelatihan tersebut merupakan pelatihan dalam pengolahan kopi dan barista untuk meracik kopi. pelatihan kopi juga diadakan oleh KEMENDIKBUD, pelatihan untuk mengasah keahlian tenaga kerja dalam mengolah kopi dan barista dalam meracik kopi. Kemudian mengikuti pelatihan packaging untuk produk asli desa sendiri yang diadakan oleh ASTRA, BUMDes *IDEA*, dan UBAYA. BUMDes Ketapanrame mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas yang berkaitan dengan pariwisata agar SDM nya terus berkembang dalam meningkatkan keahlian nya yang dapat berdampak baik dalam proses pengembangan Wisata Taman Ghanjaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BUMDes Ketapanrame sudah melaksanakan strategi dalam melaksanakan sertifikasi SDM pariwisata dan EKRAF di Wisata Taman Ghanjaran. Sertifikasi SDM pariwisata dan EKRAF yang dilaksanakan oleh BUMDes Ketapanrame berupa pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas yang berkaitan dengan pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pada SDM pariwisata dan EKRAF di dalam Wisata Taman Ghanjaran. Sertifikasi SDM pariwisata dan EKRAF yang dilaksanakan oleh BUMDes Ketapanrame di dalam Wisata Taman Ghanjaran belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan tenaga kerja atau SDM pariwisata dan EKRAF nya belum pernah mengikuti sertifikasi yang dilaksanakan secara resmi dari lembaga sertifkasi profesi. Sehingga SDM pariwisata dan EKRAF di Wisata Taman Ghanjaran belum mempunyai sertifikat secara resmi.
3. Penguatan komunitas, kelembagaan pariwisata dan EKRAF.
   Penguatan komunitas, kelembagaan pariwisata dan EKRAF menurut Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 adalah Strategi yang berfokus pada penguatan komunitas, kelembagaan pariwisata dan EKRAF. Peran masyarakat sangat berpengaruh besar pada pembangunan pariwisata dan EKRAF. Sehingga strategi ini tidak saja mengupayakan pembentukan kelembagaan maupun komunitas baru, namun dengan mengusahakan kelembagaan dan komunitas masyarakat tersebut aktif dan dapat berjalan sesuai peran nya di dalam mengembangkan pariwisata dan EKRAF. Upaya yang dilakukan BUMDes dalam hal ini yaitu BUMDes ketapanrame membuat penguatan komunitas dengan cara pembentukan kelompok pada pelaku usaha destinasi wahana permainan, pengelolaan area parkir, serta kelompok sadar wisata pada Wisata Taman Ghanjaran yang melibatkan masyarakat Desa Ketapanrame. Penguatan kelembagaan yang dilaksanakan oleh BUMDes Ketapanrame yaitu dengan adanya pembinaan dari desa dan kabupaten terkait pengelolaan pengembangan desa wisata. Dari BUMDes Ketapanrame secara internal yang dilaksanakan dalam peguatan kelembagaan nya yaitu mewajibkan tenaga kerja nya mematuhi *standar operating procedure* (SOP) yang sudah di tetapkan di Kantor BUMDes Ketapanrame. Kemudian BUMDes melaksanakn evaluasi kinerja pegawai BUMDes Ketapanrame yang berguna untuk memperbaiki kinerja pegawai yang masih belum optimal. BUMDes Ketapanrame mengupayakan peningkatan SDM nya melalui program *food ghatering* yaitu program bersantai bersama namun ada pelatihan *public speaking* nya yang bertujuan untuk melatih tenaga kerja agar dapat berbicara dengan bagus dan benar di depan umum. Dengan ini dapat di tarik kesimpulan jika BUMDes Ketapanrame sudah melaksanakan strategi pada penguatan komunitas, kelembagaan pariwisata dan EKRAF yang berada di Wisata Taman Ghanjaran. Strategi tersebut dijalankan agar bertujuan Wisata Taman Ghanjaran dapat berjalan secara optimal. Dikarenakan di dalam Wisata Taman Ghanjaran tidak bisa dijalankan secara individu, semua saling berkaitan antara komunitas pelaku usaha, komunitas pengelola wisata dengan BUMDes Ketapanrame selaku penanggung jawab Wisata Taman Ghanajaran agar Wisata Taman Ghanjaran beroperasional secara baik untuk memenuhi minat pengunjung datang di Wisata Taman Ghanjaran.

SIMPULAN

BUMDes Ketapanrame sudah melakukan enam strategi secara optimal dalam mengembangkan Wisata Taman Ghanjaran, dan satu strategi yang belum dilaksanakan secara optimal oleh BUMDes Ketapanrame di Wisata Taman Ghanjaran. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Strategi mengembangkan destinasi pariwisata dan produk EKRAF, meliputi:
   a. Pengembangan produk EKRAF berbasis klaster dan kawasan EKRAF. hal tersebut ditandai dengan adanya BUMDes Ketapanrame memanfaatkan produk asli desa nya sendiri yang di olah sebagai produk yang diperjual belikan di Wisata Taman Ghanjaran. Kemudian BUMDes Ketapanrame memfasilitasi tempat yang dinamakan pujasera sebagai tempat wisata kuliner di Wisata Taman.
   b. Pengembangan destinasi pariwisata berkualitas berdasarkan prioritas. Hal tersebut ditandai dengan adanya pengembangan destinasi yang dilaksanakan oleh BUMDes Ketapanrame secara bertahap yang sudah memperhatikan kelengkapan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas di Wisata Taman Ghanjaran.
   c. Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan. Hal tersebut ditandai dengan adanya BUMDes Ketapanrame memperhatikan kesiapan destinasi wisata pasca pandemi *COVID-19*. Salah satu contoh adanya peraturan yaitu mewajibkan pengunjung serta pelaku usaha yang terlibat di Wisata Taman Ghanjaran menerapkan protokol kesehatan. Kemudian BUMDes Ketapanrame juga melengkapi area wisata dengan wajib *scan barcode* pedulilindungi.
   d. Diversifikasi produk pariwisata. Hal tersebut ditandai dengan adanya BUMDes Ketapanrame membuat wisata yang pertama kali ada di Desa Ketapanrame dengan wisata buatan yang menjadi daya tarik pengunjung.
2. Strategi dalam mengelola SDM, kelembagaan pariwisata dan EKRAF agar dapat menghasilkan SDM yang kompeten agar dapat bersaing dengan SDM lain nya, meliputi:
   a. Optimalisasi kelembagaan atau kurikulum pendidikan serta pelatihan vokasi pariwisata dan EKRAF. Hal tersebut ditandai dengan adanya BUMDes Ketapanrame SDM pariwisata dan EKRAF nya mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, lomba mengenai pariwisata dan EKRAF yang diselenggarakan oleh dinas yang berkaitan dengan pariwisata dan EKRAF.
   b. Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan EKRAF. Pada hal ini BUMDes Ketapanrame hanya melakukan sertifikasi profesi hanya berupa pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas atau mitra. Sehingga SDM pariwisata dan EKRAF di Wisata Taman Ghanjaran belum mempunyai sertifikasi secara resmi dari lembaga sertifikasi profesi (LSP).
   c. Penguatan komunitas, kelembagaan pariwisata dan EKRAF. dalam hal ini BUMDes Ketapanrame sudah melaksanakan nya terbukti dengan adanya uapaya BUMDes Ketapanrame dalam penguatan komunitas membuat komunitas pada destinasi mainan, pengelolaan area parkir, dan kelompok sadar wisata di Wisata Taman Ghanjaran. Kemudian, BUMDes Ketapanrame melaksanakan penguatan kelembagaan pariwisata dan EKRAF nya dengan cara mendapatkan pembinaan dari desa dan kabupaten dalam mengelola Wisata Taman Ghanjaran, membuat *SOP* yang wajib di patuhi dan dilaksanakan dengan baik dan benar, dan adanya evaluasi kinerja. Kemudian terdapat program internal dari BUMDes Ketapanrame sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiana, I. P. E., & Tjukup, I. K. 2018. Kajian Yuridis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, *6*(02), 1–18.

Atmoko, T. P. H. 2014. Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman. *Jurnal Media Wisata*, *12*(2), 146–154.

Aziz, N. L. L. 2016. Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, *13*(2), 193–211.

Badarab, F., Trihayuningtyas, E., & Suryadana, M. L. 2017. Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kepulauan Togean Provinsi Sulawesi Tengah. *THE Journal : Tourism and Hospitality Essentials Journal, 7*(2), 97.

Hatta, M., Dinar, D., & Nasrullah, N. 2019. Model Strategi Pengembangan Desa Wisata Pulau Lakkang Sebagai Daya Tarik Wisata di Kota Makassar. *Jurnal Nusantara*, *20*(20), 33–37.

Hayyuna, R., Pratiwi, R. N., & Mindarti, L. I. 2014. Strategi Manajemen Aset BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDES di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik). *Jurnal Administrasi Publik*, *2*(1), 1–5.

Hermawan, H. 2017. *Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal*. *3*(2), 105

Ihsan, Ahmad Nur. 2018. Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies, 7*(04), 221–230.

Ismail, Muhammad., Widagdo, Ari Kuncara., Widodo, A. 2016. Sistem Akutansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. 19*(2), 323–

340.

Nayoan, H., & Undap, G. 2017. Peran Kapitalau Dalam Pembuatan Peraturan Desa (Suatu Studi Di Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Siau Tagulandang Biaro). *Jurnal Eksekutif*, *1*(1), 1–11.

Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Primadany, Mardiyono, & Riyanto. 2013. Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, *1*(4), 135–143.

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024.

Rohim. 2018. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Majalah Ilmiah "PELITA ILMU," 1*(1), 33–44.

Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. 2017. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 38.

Soeda, Pioh, & Kasenda. 2017. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Taulad. *Jurnal Eksekutif*, *1*(1), 1–11.

Soleh, A. 2017. Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, *5*(1), 35–52.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (alfabeta. (ed.)).

Sukmaratri, M., & Damayanti, M. 2016. Diversifikasi Produk Wisata Sebagai Strategi Pengembangan Daya Saing Wisata Kota Batu. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, *12*(3), 325.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.

Utomo, S. J., & Satriawan, B. 2018. Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. *Neo-Bis*, *11*(2), 142.